



MUKOMUKO

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Mukomuko Kejari Tayang Selesaikan Tipikor

MUKOMUKO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko sampai dengan saat ini masih terus merampungkan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di Kabupaten Mukomuko. Diantaranya dugaan Tipikor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko berkaitan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dan dana penanggulangan bencana, yang statusnya memasuki tahap penyidikan.

Kemudian dugaan Kerugian Negara (KN) dalam pembangunan gedung Pengadilan Agama (PA), serta dugaan Pungli SMAN 1 Mukomuko yang statusnya saat ini masih di tahap penyelidikan.

Berkaitan dengan dugaan Tipikor, dana kebencanaan BPBD Kabupaten Mukomuko, ditahun 2022. Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim, SH, MH mengatakan, saat ini proses penyidikan masih terus berjalan, pemanggilan saksi mulai dilakukan. Baru saja Bendahara BPBD inisial SM yang menjabat pada waktu itu telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Guna menanyakan seperti apa proses penggunaan anggaran pada waktu itu. Tentunya dalam penyidikan ini, penyidik Kejari Mukomuko akan mencari dua alat bukti. Sebelum dilakukan perhitungan total kerugian negara dan penetapan tersangka.

"SM menjabat sebagai bendahara BPBD di tahun 2022 sudah kita panggil, nanti akan dilanjutkan pemanggilan terhadap pejabat lainnya secara bertahap, termasuk kepala BPBD pada waktu itu," kata Agung.



AGUNG MALIK HAKIM

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun 2022. Yang pertama penanggulangan bencana dengan pagu anggaran Rp 628 juta dan BTT sebesar Rp 348 juta. Yang pergunanya diduga tidak sesuai dengan peraturan dan peruntukan, sehingga memunculkan Kerugian Negara (KN).

Agung menambahkan, untuk dana kebencanaan ini ada dua, yang pertama BTT dan dana penanggulangan bencana. Pemanggilan saksi ini sangat diperlukan agar dapat mengetahui seperti apa penggunaan anggaran dalam dua kegiatan tersebut, baik penggunaan anggaran untuk membeli bantuan, honor petugas, biaya akomodasi dan masih banyak rincian-rincian pengeluaran yang akan di periksa. Sebab penggunaan dua dana bencana ini di tahun yang sama, dan bencana yang sama.

"Kami akan pastikan kedua kegiatan itu apakah benar-benar berjalan

keduanya atau hanya satu kegiatan saja, jangan sampai ada kegiatan fiktif," ujarnya

Agung menambahkan, dalam penanganan dugaan tindak pidana ini, penyidik kejaksaan akan fokus memeriksa penggunaan anggaran kebencanaan BPBD Mukomuko yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun 2022. Yang pertama penanggulangan bencana dengan pagu anggaran Rp 628 juta dan BTT sebesar Rp 348 juta. Yang pergunanya diduga tidak sesuai dengan peraturan dan peruntukan, sehingga memunculkan Kerugian Negara (KN).

AGUNG MALIK HAKIM

Agung juga menyampaikan, sedangkan untuk perkembangan penanganan dugaan KN pada proyek gedung PA, hingga kemarin (13/9) belum dilakukan pemanggilan saksi untuk mengetahui riwayat peristiwa. Sebab berkaitan dengan keterbatasan penyidik seluruhnya sedang turun ke RSUD Mukomuko untuk melakukan crosscek data penerima honor terhadap pegawai RSUD. Namun dua pegawai PA sudah dilakukan pemanggilan untuk menunjukkan dokumen pekerjaan. Begitu juga untuk dugaan pungli SMAN 1 juga sudah dilakukan pemanggilan pihak sekolah untuk menjelaskan peristiwanya.

"Kita akan selesaikan satu persatu, karena keterbatasan jumlah penyidik. Baik RSUD, dana bencana BPBD yang sudah di tahap penyidikan. Begitu juga proyek putus kontrak PA dan dugaan pungli yang masih ditahap penyelidikan," tandasnya. (pir)

"Khusus untuk penggunaan anggaran BTT ada sejumlah tahapan, diantaranya BPBD Mukomuko menyurati bupati Mukomuko. Karena bupati memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini

Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko mencairkan dana BTT yang telah diusulkan. Kemudian anggaran pun dicairkan dan digunakan oleh BPBD, sedangkan penggunaan anggaran penanggulangan bencana bisa langsung digunakan," terangnya.

Lanjutnya, untuk kedua anggaran baik BTT dan penanggulangan bencana BPBD Mukomuko tersebut dilaporkan habis terbelanjakan pada tahun tersebut, dengan asumsi seluruh kegiatan sudah berjalan.

Agung juga menyampaikan, sedangkan untuk perkembangan penanganan dugaan KN pada proyek gedung PA, hingga kemarin (13/9) belum dilakukan pemanggilan saksi untuk mengetahui riwayat peristiwa. Sebab berkaitan dengan keterbatasan penyidik seluruhnya sedang turun ke RSUD Mukomuko untuk melakukan crosscek data penerima honor terhadap pegawai RSUD. Namun dua pegawai PA sudah dilakukan pemanggilan untuk menunjukkan dokumen pekerjaan. Begitu juga untuk dugaan pungli SMAN 1 juga sudah dilakukan pemanggilan pihak sekolah untuk menjelaskan peristiwanya.

"Kita akan selesaikan satu persatu, karena keterbatasan jumlah penyidik. Baik RSUD, dana bencana BPBD yang sudah di tahap penyidikan. Begitu juga proyek putus kontrak PA dan dugaan pungli yang masih ditahap penyelidikan," tandasnya. (pir)